



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir 11 Juli 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PARE PARE, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rahmat, S.H. dan Khaerul Anwar, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman Kompleks Mutiara Residence No. A.15 Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, 91125 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 183/P/SKH/IX/2023/PAPare tanggal 22 September 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Parepare, xxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pare, tanggal 25 September 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Safar 1442 H atau tanggal 21 September 2020, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0166/208/IX/2020 tanggal 21 September 2020. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo. Peraturan Pemerintah nomor : 9 Tahun 1975;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus seorang gadis dan Tergugat adalah bujang;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Pancasila Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxx. Hanya setahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah mertua (orang tua Tergugat) di Jln. Opu dg. Risaju (Jembatan Merah);
4. Dari hasil perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Al Ghifari Bin Fadli, lahir di Parepare tanggal 30 Juni 2023 (usia : 2 bulan);
5. Bahwa anak tersebut masih tergolong belum mumayyiz, oleh karena itu Pengggugat memohonkan hak asuh anak jatuh dan ditetapkan hak asuh kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a bahwa :
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

Oleh karena itu untuk menjamin kelangsungan hidup dan biaya pendidikan anak tersebut kelak, maka Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Biaya ini akan bertambah

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pare



sebesar 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya seiring perkembangan dan kebutuhan hidup si anak;

6. Bahwa setahun di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pancasila Parepare, Penggugat dan Tergugat kemudian memutuskan untuk pindah kerumah orang tua Tergugat di Jalan Opu dg. Risaju (Jembatan Merah) Parepare;

7. Bahwa diawal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa berjalan harmonis dan baik-baik saja. Namun memasuki usia perkawinan yang kedua tahun, Penggugat sudah sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan tidak segan-segan memukul dan mencaci maki Penggugat, meskipun itu di depan orang tuanya.

Namun demi menjaga keutuhan rumah tangganya, Penggugat selalu bersabar dan tidak memperlakukan secara hukum atas kekerasan fisik dan non fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

8. Bahwa memasuki awal tahun 2022 itu juga, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi keributan dan perselisihan. Ulah Tergugat semakin menjadi-jadi oleh karena setiap kali terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi (Tergugat selalu marah jika dimintai uang), Tergugat sering mengucapkan kalimat sekarang saya talak kamu. Kata talak sudah sedemikian gampang dan seringnya Penggugat ucapkan keluar dari mulut Tergugat. Tidak saja diucapkan langsung dihadapan Penggugat, tetapi juga lewat telepon dan Voice Mail atau rekaman suara;

9. Bahwa demikian pula dalam masa kehamilan Penggugat. Pertengkaran demi pertengkaran selalu terjadi. Tergugat selain mengucapkan kata talak, Tergugat juga sering mengusir Penggugat untuk kembali ke orang tua Penggugat. Karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, akhirnya Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat di Jln Opu Dg. Risaju sekitar bulan Juli 2022 dan Penggugat tinggal di rumah orang tua sendiri di Jalan Pancasila hingga sekarang;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi hingga meluas kedalam lingkungan keluarga besar masing-masing yang



mengakibatkan upaya merukunkan hubungan Penggugat dan Tergugat semakin sulit terwujud. Meskipun masing-masing pihak telah berupaya menyelesaikan perselisihan secara musyawarah namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Hingga kemudian lahir anak mereka yang bernama Muhammad Al Ghifari Bin Fadli pada bulan Juni 2023. Sikap Tergugat bukannya membaik, namun terlihat cuek yang berakibat pertengkaran. Meskipun Penggugat sudah meminta tolong bantuan keluarga untuk memediasi, namun Tergugat tetap tidak menghiraukan Penggugat dan anak kandungnya Muhammad Al Ghifari bin Fadli;

12. Karena merupakan hak Penggugat akibat timbulnya talak ini, maka Penggugat juga mengajukan Tuntutan berupa :

12.1. Nafkah Mut'ah (kenang-kenangan)

bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar mut'ah (suatu pemberian kenang-kenangan) dari mantan suami untuk menghibur hati mantan isteri) berupa emas seberat 5 gram.

Meskipun perceraian ini atas kehendak Penggugat, namun dengan telah terjadi Tamkin (satu rumah) dan taslim (penyerahan diri Penggugat) selama kurang lebih 3(tiga) tahun lamanya dan juga telah mendampingi suami, baik dalam suka maupun duka, maka sudah sewajarnya Tergugat memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada mantan isterinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf a serta Pasal 158 huruf b dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan Al-Qur'an Surat ke 2 [Al Baqoroh] ayat 241 yang artinya :

Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa .

Dan juga pernyataan Ibnu 'umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa Malik Juz III Bab Mut'ah Thalaq halaman 94 yaitu :

“bagi setiap isteri yang ditalak ada mut'ahnya “.



Oleh karena itu Penggugat menuntut kiranya yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara memutus besarnya mut'ah yang layak dan pantas berdasarkan kepatutan dan keadilan untuk Penggugat adalah sebesar 5(lima) gram emas.

12.2. Nafkah masa lalu (Madhiyah)

bahwa Penggugat juga menuntut nafkah masa lampau pada Tergugat terhitung sejak Januari 2023 s/d September 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sehingga menjadi 8 bulan x @Rp 2.000.000,00 = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Tuntutan nafkah masa lampau ini diajukan oleh karena faktanya sejak menikah sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat secara nyata telah melalaikan kewajibannya selama 24 bulan lamanya. Tuntutan ini diajukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku (Vide Pasal 34 Ayat 1 dan Pasal 41 huruf C Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Oleh karena itu, Penggugat memohon ke Yang Mulia Majelis Hakim yang memutus perkara ini kiranya berkenan menghukum Tergugat agar menetapkan hal ini menjadi kewajiban Tergugat untuk menyerahkan : nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah masa lampau kepada Penggugat sebesar masing-masing nilai tersebut di atas;

- Mut'ah = 5(lima) gram emas
- Nafkah masa Lampau = Rp. 16.000.000,-

13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana



perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

14. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 22 ayat (1) :

"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat".

16. Bahwa dengan demikian hubungan antara Penggugat dan Tergugat tentu tidak lagi akan dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat saat menerima pinangan Tergugat hingga sampai melangsungkan pernikahan. Penggugat merasa takut, trauma dan tidak ingin lagi membentuk rumah tangga dengan Tergugat;

17. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat (Penggugat tidak dalam keadaan *nusyuz*), maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Amelya AyuLestari binti Syafrusddin) ;
3. Menetapkan kewajiban dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk Muhammad Al Ghifari Bin Fadli:
 - 3.1. Nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya. Nafkah anak ini bertambah setiap tahunnya sebaesar 20 % (dua puluh persen) seiring perkembangan dan kebutuhan anak;
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar :
 - 4.1. Mut'ah (kenang-kenangan) = 5(lima) gram emas
 - 4.2. Nafkah masa Lampau = Rp16.000.000,00

Membebankan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila yang mulia majelis Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum Rahmat, S.H. dan Khaerul Anwar, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Jenderal Sudirman Kompleks Mutiara Residence No. A.15 Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, 91125 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 183/P/SKH/IX/2023/PAPare tanggal 22 September 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menurut relaas Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pare tanggal 29 September 2023 dan 13 Oktober 2023

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan perbaikan mencabut posita pada angka 5 dan 12 serta mencabut petitum pada angka 3 dan 4;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0166/208/IX/2020 Tanggal 21 September 2020, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Pancasila Selatan, xxx x, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, xxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 September 2020 di KUA xxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pare



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Al Ghifari Bin Fadli, lahir di Parepare tanggal 30 Juni 2023 (usia 2 bulan);
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak memasuki usia perkawinan yang kedua tahun sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi (Tergugat selalu marah jika dimintai uang), dan jika Tergugat marah, Tergugat sering mengucapkan kalimat sekarang saya "talak kamu".
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 September 2020 di KUA xxxxx xxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;



- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Al Ghifari Bin Fadli, lahir di Parepare tanggal 30 Juni 2023 (usia 2 bulan);
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak memasuki usia perkawinan yang kedua tahun;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat karena masalah ekonomi, jika Penggugat minta uang kepada Tergugat, maka Tergugat selalu marah;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor tanggal , ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kedua Saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 September 2020 di Kecamatan KUA xxxxx xxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx ;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Al Ghifari Bin Fadli, lahir di Parepare tanggal 30 Juni 2023 (usia 2 bulan);;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2022 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata talak ketika bertengkar;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pare



berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
5. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pare-pare, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pare-pare;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;



6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughraa* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughraa* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Harmina Arifin, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.
Hakim Anggota

Achmad Ubaidillah, S.H.I

ttd

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Harmina Arifin, S.HI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	21.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Putusan Tanggal :

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare,

Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap Tanggal :

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)